

Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan

* Syahrul Ropandi¹, Data Wardana²

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

*Corresponding Author : syahrulropandi@student.uir.ac.id

Abstrak

Penelitian ini adalah untuk mengetahui Tugas Kepala Desa dalam Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan evaluasi kebijakan William N Dunn. Adapun indicator dalam penelitian ini yakni:efektivitas, efesiensi, kecukupan, pemerataan, ketepatan, dan responsivitas. Penelitian ini dilakukan di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu yaitu dengan cara melibatkan orang-orang yang berkaitan. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tugas kepala desa masih kurang baik dalam Pengelolaan Aset Desa, khususnya Aset bangunan. Banyak Aset Desa yang kurang terawat dan belum dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkatnya dalam Pengelolaan Aset Desa, agar Aset Desa dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat serta mendukung Pembangunan Desa yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Tugas Kepala Desa, Kepemimpinan, Pengelolaan Aset.

Abstract

The purpose of this study is to determine the Duties of the Village Head in Managing Village Assets by the Pematang Tinggi Village Government, Kerumutan District, Pelalawan Regency. This study uses a qualitative research method. The theory used in this study uses William N Dunn's policy evaluation. The indicators in this study are: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, accuracy, and responsiveness. This study was conducted in Pematang Tinggi Village, Kerumutan District, Pelalawan Regency. The data collection techniques used were interviews, observations, and documentation. The technique for determining informants was determined intentionally based on certain criteria or considerations, namely by involving related people. Based on the results of this study, it can be concluded that the duties of the village head are still lacking in Managing Village Assets, especially building assets. Many Village Assets are poorly maintained and have not been optimally utilized for the benefit of the community. The conclusion of this study is the need to increase the capacity of village heads and their staff in Managing Village Assets, so that Village Assets can provide maximum benefits to the community and support sustainable Village Development.

Keywords : Village Head Duties, Leadership, Asset Management.

PENDAHULUAN

Desentralisasi di Indonesia telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan, terutama melalui kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah, termasuk pemerintah desa, untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengelolaan aset desa yang efektif dan berkelanjutan. Pengelolaan aset desa yang baik tidak hanya meningkatkan pelayanan publik, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.

Namun dalam praktiknya, pengelolaan aset desa kerap menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kurangnya pemahaman terhadap regulasi, hingga lemahnya pengawasan dan pemanfaatan aset. Kondisi ini juga ditemukan di Desa Pematang Tinggi, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, dimana sejumlah aset desa, khususnya aset bangunan, belum dikelola secara optimal dan kurang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Permasalahan ini menimbulkan urgensi untuk melakukan evaluasi terhadap tugas kepala desa dalam pengelolaan aset desa, guna mengidentifikasi faktor-faktor penghambat serta merumuskan solusi yang tepat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn, yang mencakup indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, ketepatan, dan responsivitas. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan tugas kepala desa dalam pengelolaan aset desa serta rekomendasi untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja aparatur desa dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan evaluasi kebijakan berdasarkan teori William N. Dunn. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan tugas kepala desa dalam pengelolaan aset desa, dengan fokus pada indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, presisi, dan tanggung jawab. Metode kualitatif memungkinkan peneliti menggali data secara komprehensif melalui interaksi langsung dengan informan yang memiliki peran dan pengalaman terkait pengelolaan aset desa.

Lokasi penelitian dipilih di Desa Pematang Tinggi, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, yang menjadi objek kajian karena adanya permasalahan dalam pengelolaan aset desa, khususnya aset bangunan yang kurang terawat dan belum dimanfaatkan secara optimal. Informan penelitian ditentukan secara purposive, yaitu dengan memilih pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan aset desa, seperti kepala desa, perangkat desa, dan tokoh. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta dokumentasi sebagai sumber pendukung data.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan ini bertujuan untuk menginterpretasikan data secara sistematis sehingga dapat menggambarkan kondisi nyata pelaksanaan tugas kepala desa dalam pengelolaan aset desa. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kendala dan potensi yang ada serta rekomendasi untuk peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkatnya dalam pengelolaan aset desa demi mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Evaluasi Tugas Kepala Desa dalam Pengelolaan Aset Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, ditemukan bahwa pelaksanaan tugas kepala desa dalam pengelolaan aset desa masih belum optimal. Hal ini terlihat dari beberapa kondisi aset desa berupa bangunan yang kurang terawat dan belum dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat. Berdasarkan indikator evaluasi kebijakan William N. Dunn yang mencakup efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, masih terdapat kendala dalam pengelolaan aset desa terutama pada aspek efektivitas dan efisiensi. Aset bangunan seperti yang tercantum dalam daftar aset desa belum memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat karena kurangnya pemeliharaan dan pemanfaatan yang tepat.

A. Efektivitas

Efektivitas merupakan pencapaian tujuan akurat melalui sasaran yang tepat serta kebijakan yang dirumuskan selaras dengan tujuan dan fungsinya. Peneliti berupaya menganalisis evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas Kepala Desa dalam Pengelolaan Aset yang berupa bangunan di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Adapun daftar pertanyaan wawancara yang peneliti lakukan kepada responden mengenai efektivitas terkait tentang Tugas Kepala Desa dalam Pengelolaan Aset Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

1. Jumlah Aset yang digunakan atau di dimanfaatkan oleh masyarakat

Jumlah aset yang digunakan atau dimanfaatkan merupakan tolak ukur utama dalam menilai efektivitas pengelolaan Aset Desa. Dalam konteks ini, peneliti menilai sejauh mana Aset Desa yang tersedia, seperti gedung, tanah, maupun fasilitas lainnya, benar benar sudah di dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan pemerintah desa. Semakin banyak aset yang digunakan secara aktif dan produktif, maka semakin tinggi pula tingkatan efektivitas pengelolaan aset yang dilakukan oleh kepala desa.

2. Menjaga dan memelihara Aset Desa

Aspek yang penting dalam memastikan keberlanjutan pemanfaatan Aset Desa adalah menjaga dan pemeliharaan Aset tersebut. Peneliti menekankan bahwa desa memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap Aset Desa tetap dalam kondisi baik, aman, dan layak pakai. Dengan menjaga dan memelihara Aset secara berkala, manfaat dari aset dapat terus dirasakan oleh masyarakat dalam jangka panjang, dan nilai aset pun tetap terjaga.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan dalam pemanfaatan dan pemeliharaan Aset Desa belum sepenuhnya optimal. Pemanfaatan dan Pemeliharaan Aset Desa, khususnya bangunan, belum optimal karena kondisi fisik yang terbatas dan keterbatasan dana. Pemerintah Desa masih memprioritaskan kebutuhan lain, sehingga perawatan dan menjaga pemeliharaan Aset belum maksimal dan adanya aset desa yang terbengkalai, seperti kantor Desa lama, balai Desa, kantor KUD (Koperasi Unit Desa), Puskesmas dan kantor KUPT (Kesatuan Usaha Pertanian Terpadu) yang dibiarkan tidak terpelihara dan tidak dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Secara Efektivitas Pengelolaan Aset Desa di Desa Pematang Tinggi masih rendah karena belum tercapainya tujuan pemanfaatan dan pemeliharaan secara menyeluruh.

B. Efisiensi

Efisiensi merujuk pada tingkat pemanfaatan sumber daya dalam suatu proses. Proses tersebut dianggap semakin efisien apabila penggunaan sumber daya dilakukan secara lebih hemat atau minimal, yang ditunjukkan melalui perbaikan proses sehingga menjadi lebih sederhana dan cepat. Untuk memperkuat temuan pada indikator efisiensi, peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden.

1. Penggunaan Anggaran untuk Pengelolaan Aset

Penggunaan anggaran yang efisien sangat menentukan keberhasilan Pengelolaan Aset Desa. Peneliti menekankan pentingnya kepala desa dalam penggunaan anggaran atau mengalokasikan dana secara tepat sasaran, dalam memelihara maupun pemanfaatan aset desa.

2. Jumlah Sumber Daya Manusia yang Digunakan

Jumlah sumber daya manusia (SDM) merupakan aspek penting dalam pengelolaan aset desa untuk menilai efisiensi kinerja Kepala Desa. Peneliti menyoroti bahwa pengelolaan aset desa yang baik membutuhkan keterlibatan perangkat desa yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, Pengelolaan Aset Desa dapat berjalan dengan baik tanpa adanya tumpang tindih dalam pekerjaan atau kekurangan tenaga kerja.

Dari hasil observasi dan melakukan wawancara dapat disimpulkan bahwa Penggunaan anggaran untuk pemeliharaan aset desa sudah dialokasikan dengan baik, namun belum sepenuhnya efisien karena keterbatasan dana dan prioritas lainnya. Sementara itu, sumber daya manusia yang mengelola aset desa sudah mencukupi, meskipun pengelolaannya belum optimal akibat keterbatasan aset dan kebutuhan peningkatan kapasitas SDM. Dapat disimpulkan bahwasanya pemerintah desa belum maksimal dalam menjalankan pengelolaan aset desa dan sasaran dari pengelolaan aset desa belum sepenuhnya tercapai yang telah ditetapkan. Secara Efisiensi Pengelolaan Aset Desa belum optimal, baik dari anggaran maupun pemanfaatan sumber daya manusia SDM.

C. Kecukupan

Kecukupan dapat diartikan sebagai ukuran sejauh mana tingkat efektivitas pencapaian hasil pemanfaatan aset yang menimbulkan permasalahan. Kecukupan berfungsi sebagai indikator yang menilai sejauh mana hasil yang diperoleh mampu mengatasi permasalahan yang ada, serta mencerminkan tindakan yang diambil dalam rangka penyelesaian masalah tersebut.

1. Ketersediaan Fasilitas Aset Desa

Ketersediaan fasilitas aset desa menjadi indikator penting dalam menilai kecukupan pengelolaan aset desa secara baik. Peneliti menilai apakah jumlah dan jenis aset desa yang ada sudah memadai untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Kecukupan tercapai jika masyarakat dapat mengakses fasilitas aset desa tersebut.

2. Peran Aset dalam Membantu Lancarnya Pelayanan Publik

Peran aset desa sangat penting dalam menunjang kelancaran pelayanan publik di lingkungan masyarakat desa. Dengan tersedianya aset yang memadai dapat berjalan

lebih efektif dan efisien. Kepala desa bertanggung jawab memastikan setiap aset dapat digunakan secara optimal untuk mendukung aktivitas pelayanan publik .

Berdasarkan dari hasil wawancara , dapat disimpulkan bahwasanya Aset Desa yang tersedia saat ini belum cukup untuk mendukung seluruh kegiatan pemerintahan desa dan pelayanan public secara optimal. Meskipun peran aset desa dalam membantu kelancaran pelayanan public sudah berjalan dengan baik, namun pelaksanaannya belum maksimal karena keterbatasan dan pengelolaan yang belum optimal. Secara segi Kecukupan Aset Desa masih kurang , sehingga pelaksanaan tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat terhambat.

D. Pemerataan

Pemerataan merupakan indicator yang menilai apakah dari suatu program yang ada hasil dapat dimanfaatkan dan dapat dinikmati secara merata oleh semua pihak yang berkaitan.

1. Persebaran Pemanfaatan Aset

Pemerataan pengelolaan aset desa diukur dari sejauh mana distribusi pemanfaatan aset dapat dirasakan oleh seluruh warga desa secara adil, tanpa diskriminasi dan tidak berpusat hanya pada satu wilayah atau kelompok tertentu. Sehingga setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan aset desa.

2. Akses Masyarakat terhadap Aset Desa

Akses masyarakat merupakan indicator yang sangat penting dalam menilai pemerataan. Peneliti memaparkan bahwa kepala desa harus memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses aset desa tersebut. Termasuk kelompok rentan,dapan dengan mudah untuk mengakses dan memanfaatkan aset desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.hal ini pentingnna untuk mencegah terjadinya kesenjangan sosial di tingkat desa.

Dari hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwasanya pembagian pemanfaatan/mengakses Aset Desa di Desa Pematang Tinggi belum merata sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat desa,sehinga belum semua kelompok marasakan manfaatnya secara optimal.kepala desa dan sekretaris desa mengakui perlunya peningkatan dan evaluasi berkelanjutan dalam pengeleloan aset desa. dalam hal ini pemerintah desa wajib meningkatkan lagi dalam pemanfaatan/mengakses aset desa dan Pengelolaan Aset Desa.secara pemerataan aset desa masih belum tercapai ,sehingga belum semua kelompok masyarakat merasakan manfaatnya secara optimal.

E. Responsivitas

Responsivitas adalah indicator dalam bentuk tanggap dari sasaran program yang dapat dilihat dari keterlibatan sasaran program ataupun bentuk partisipasi sasaran program yang ada.Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefensi, atau kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

1. Tanggapan Pemerintah Desa terhadap keluhan masyarakat

Tanggapan Pemerintah Desa terhadap keluhan masyarakat merupakan respons atau reaksi pemerintah desa terhadap masalah atau keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Tanggapan ini dapat berupa tindakan konkret, kebijakan, atau komunikasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Melakukan Survei atau Evaluasi Kepuasan Masyarakat terhadap Pemanfaatan Aset Desa

Melakukan survei atau evaluasi merupakan langkah penting yang dapat dilakukan oleh kepala desa terhadap kepuasan masyarakat, untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan Aset Desa sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan mengadakan survei atau melakukan evaluasi kepala desa dan perangkat desa dapat mengumpulkan masukan, kritik, dan saran dari masyarakat.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya dalam hal tanggapan dan pengaduan masyarakat terkait pengelolaan Aset Desa, pihak desa cukup terbuka menerima masukan, namun pengelolaan dan penyediaan aset desa masih belum maksimal sehingga penanganan pengaduan belum sepenuhnya memuaskan. Selain itu, desa belum melakukan survei atau evaluasi kepuasan masyarakat. Dan dari segi pelaksanaannya kurang optimal dan dalam pemerataan hasil dari pengelolaan aset desa belum sepenuhnya tercapai. Secara segi Responsivitas Pemerintah Desa dalam menanggapi kebutuhan dan keluhan masyarakat masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal evaluasi kepuasan masyarakat.

F. Ketepatan

Ketepatan adalah indikator yang dapat dinilai apakah suatu kebijakan atau program yang dijalankan telah sesuai dengan yang diinginkan dan berdasarkan kemampuan dalam menjalankannya.

1. Kesejahteraan Aset dengan tujuan awal pengadaan

Keseuaian pengelolaan aset dengan tujuan awal pengadaannya berarti aset digunakan sesuai dengan maksud dan rencana pada aset tersebut pertama kali diadakan. Kepala desa perlu memastikan bahwa setiap aset benar-benar dirasakan oleh masyarakat sesuai dengan tujuan awal pengadaan aset tersebut. Jika aset digunakan sesuai dengan tujuan awal, maka pengelolaan aset desa dinilai sudah tepat dan efisien.

2. Ketepatan sasaran Pemanfaatan Aset

Selain mematuhi aturan, juga berarti aset desa dimanfaatkan secara baik dan tepat sasaran yang benar-benar dirasakan oleh warga desa. Peneliti menjelaskan bahwa kepala desa harus memastikan bahwa aset harus digunakan untuk kepentingan masyarakat luas, terutama kelompok yang paling membutuhkan dukungan dari pemerintah desa.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pengelolaan aset desa di Desa Pematang tinggi ini belum tepat dan belum sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Secara ketepatan sasaran pengelolaan aset desa masih belum tercapai, sehingga berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat terbatas.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan analisa penelitian bahwa evaluasi tugas kepala desa dalam pengelolaan aset desa pematang tinggi kecamatan kerumutan kabupaten pelalawan belum terlaksana dengan baik yang ditinjau berdasarkan konsep operasional dan variabel, hal ini dikarenakan:

1. Keterbatasan dana
2. Kurangnya perencanaan dan koordinasi yang efektif
3. Sumber daya manusia (SDM) yang belum memadai dalam pengelolaan aset desa.

Meskipun desa terbuka terhadap keluhan dan masukkan masyarakat, namun penanganan keluhan tersebut belum maksimal karena pengelolaan aset desa kurang tersisir dengan baik. Desa juga belum melakukan survei atau evaluasi kepuasan masyarakat terhadap pemanfaatan aset desa. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan responsivitas dan transparansi dalam pengelolaan aset.

Dan pemanfaatan aset desa belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan awal pengadaannya dan belum memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Banyak aset yang masih dalam kondisi rusak dan kurang terpelihara, sehingga masyarakat belum merasakan manfaatnya secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam pemeliharaan dan pemanfaatan aset agar Aset Desa dapat berfungsi secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pers Universitas Gadjah Mada.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Widodo, Joko. 2015. *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia.